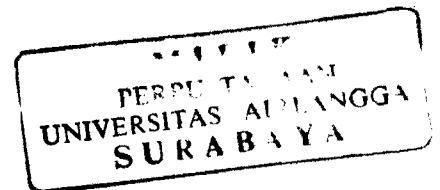


SKRIPSI

DYAH NURSANTI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN
FIDUSIA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

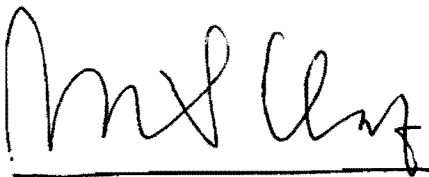
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN
FIDUSIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

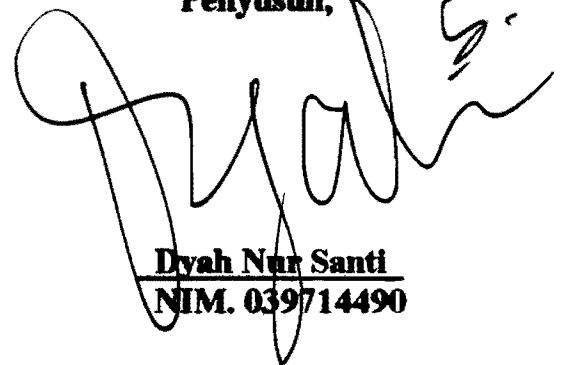


Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the supervisor, Hj. Moerdiati S., S.H., M.S.

Hj. Moerdiati S., S.H., M.S.
NIP. 130 287 031

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the author, Dyah Nur Santi.

Dyah Nur Santi
NIM. 039714490

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Obyek jaminan fidusia sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 meliputi benda bergerak seperti kendaraan bermotor, stock barang dagangan, benda dalam persediaan (inventaris), dan lain-lain dan benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan seperti bangunan diatas tanah hak sewa, bangunan diatas tanah hak pakai, serta satuan rumah susun yang berada diatas tanah hak pengelolaan.

Obyek jaminan fidusia yang diperdagangkan adalah benda dalam persediaan (inventaris) dan stock barang dagangan. Tapi benda-benda tersebut harus diganti oleh debitur dengan benda yang mempunyai kualitas yang sama dan dengan kuantitas yang sama.

- b. Upaya hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang membeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah dengan cara masuk menjadi para pihak dalam perkara sebagai pihak intervenien. Pihak ketiga dapat mempertahankan haknya dari tuntutan kreditur dengan menyatakan bahwa ia adalah pemilik benda jaminan tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan BW dan Undang-Undang No.42 Tahun 1999, bahwa hukum memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang membeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

terhadap tuntutan kreditur. Dalam BW, hal ini dirumuskan dalam Pasal 1977 BW yang memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga sehingga dapat diartikan bahwa terhadap seseorang yang membezi benda bergerak dengan itikad baik ia akan dilindungi oleh undang-undang (Pasal 1977 ayat (1) BW). Pihak ketiga yang mendapat perlindungan hukum dari Pasal 1977 ayat (1) BW ini terbatas pada pihak ketiga yang membeli benda jaminan berupa benda bergerak tidak atas nama. Tapi jika atas benda jaminan tersebut kreditur dapat menunjukkan bukti kepemilikannya (dengan menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia) maka kreditur dapat menuntut kembali benda jaminan tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999, Pasal 22 memberikan perlindungan yang lebih tegas terhadap pihak ketiga yang membeli benda jaminan yang merupakan benda persediaan atau stock barang dagangan yaitu bahwa pihak ketiga ini bebas dari tuntutan dengan ketentuan harga penjualan benda telah dibayar lunas.

2. Saran

- a. Dalam rumusan pasal-pasal nya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai benda-benda apa saja yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia dan dapat dijual oleh debitur atau setidaknya hal tersebut diuraikan dalam penjelasan. Pengaturan yang kurang jelas tersebut memberikan kemungkinan untuk adanya interpretasi yang berbeda-beda.

- b. Walaupun pihak ketiga diberikan perlindungan oleh BW dan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tapi dirasakan kurang memadai. Yaitu tidak diatur secara khusus mengenai upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga untuk mempertahankan haknya dari kreditur apabila terdapat secara jelas dan tegas sehingga fungsi hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi setiap orang dapat tercapai. Peraturan-peraturan pelaksanaan yang berkaitan atau disyaratkan oleh Undang-Undang No.42 Tahun 1999 harus segera dibuat. Agar Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dapat dilaksanakan secara efektif. Perbuatan debitur berupa menjual benda jaminan kepada pihak ketiga tentu saja merugikan pihak kreditur sebagai pemilik benda jaminan dan dapat juga merugikan pihak ketiga. Oleh karena itu, debitur harus diberi sanksi pidana yang berat. Walaupun Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 42 / 1999 memberikan sanksi pidana kepada debitur tapi seharusnya sanksi pidananya diperberat. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa kreditur ataupun pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan/perbuatan debitur tersebut, dengan denda yang harus dipenuhi debitur tidak bisa menutup kerugian dari kreditur atau kerugian pihak ketiga. Karena nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia lebih besar dari dendanya. Dengan keadaan ini, fungsi pengenaan sanksi pidana sebagai upaya preventif dan represif tidak terpenuhi.

